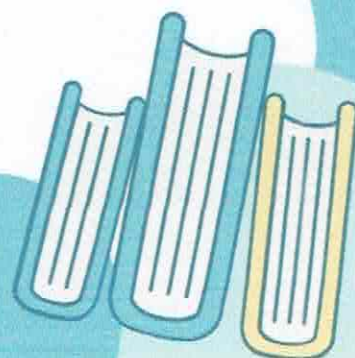




**Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin**

**Perubahan Renja
Tahun 2025
Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Allah SWT kami panjatkan, dengan segala kerja keras dan dukungan kerjasama yang baik akhirnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA-P) Tahun 2025 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA-P) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 disusun berdasarkan pada program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, analisis dan perencanaan strategis yang kiranya dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi nyata Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 16 Juni 2025.

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

HARYADI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690804 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR BAGAN.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1-5
1.2 Landasan Hukum	5-8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	9-12
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN	 13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Berjalan dan Capaian Renstra	13-15
2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	15
2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi Target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan	15-17
2.1.3 Realisasi program /kegiatan yang telah melebihi target kinerja	17
2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan.....	17-18
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.....	18
2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.....	18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	27-28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	28-29
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.....	29-34

2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.....	35
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35-36
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	36-37
3.3	Program dan Kegiatan.....	38-43
BAB IV	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....	44
	Program dan Rencana Kerja Tahun 2025	45-58
BAB V	PENUTUP	59
	Penutup.....	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Anggaran dan Capain Realisasi Program/Kegiatan Sampai Bulan Juni 2025 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	13-14
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	20-26
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	27
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD.....	31-33
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin.....	34
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.....	38
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 pada APBD-P	39-43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2025 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan ditambah Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah.



Pertama-tama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja-PD tahun berjalan, evaluasi capaian Renstra, sampai pada pengkajian terhadap kondisi terkini yang dihadapi.

Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting perumusan program/kegiatan berikutnya.

Secara umum, proses penyusunan Perubahan Renja-PD, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian dokumen Perubahan Renja-PD, seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran OPD, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun berjalan.

Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Perubahan Renja yakni penyusunan rancangan Perubahan Renja OPD berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama. Selanjutnya dibahas bersama TAPD dalam menetapkan pagu indikatif hingga menjadi Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Perubahan Renja yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan akhir RKPD.



2. Penyusunan Perubahan Renja-PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Perubahan Renja-PD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun berjalan; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan Program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Program/kegiatan dalam RKPD provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD-P provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD kabupaten/kota dirinci menurut sumber dana APBD-P kabupaten/kota, APBD-P provinsi, APBN dan sumber lainnya.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.



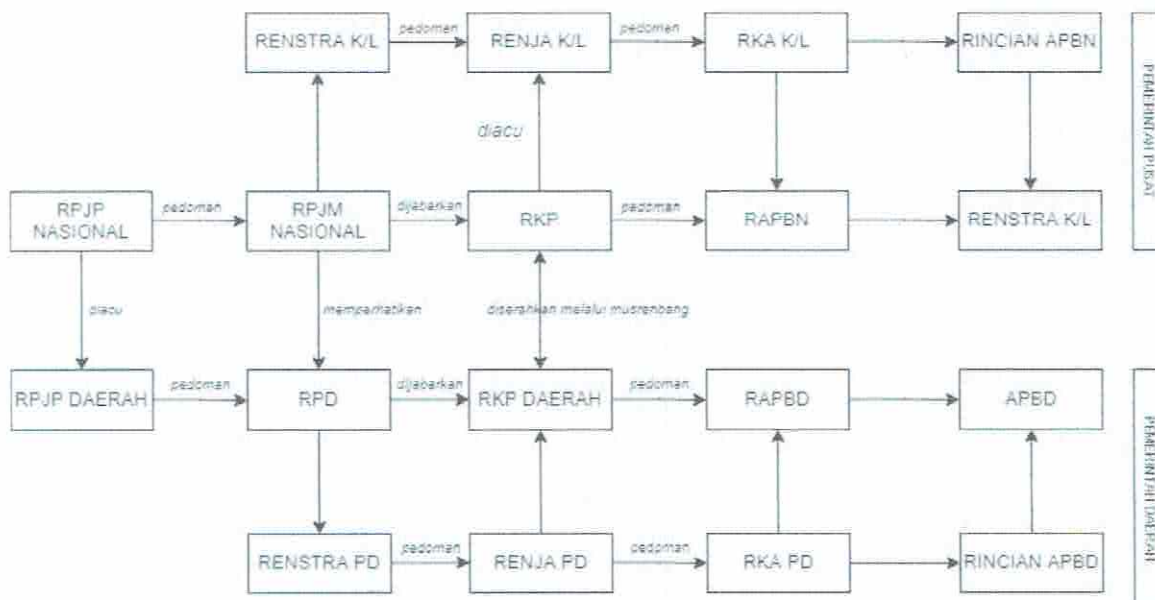
Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 berpedoman Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029.

Perubahan Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Gambaran tentang hubungan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan system perencanaan pembangunan maupun dengan system keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar1.1

Gambar 1.1.

Hubungan Renja OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Perubahan Renja-PD tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJMD Daerah, Renstra K/L dan Rencana OPD dan RKPD Daerah.

Berpedoman pada dokumen menurut alur perencanaan tersebut, maka Perubahan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun hingga menjadi sebuah dokumen yang akan menjadi acuan untuk 1 (satu) tahun kedepan.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029. RPJMD menurut arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin selama setahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



3. Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu:



1. Sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan khusus tahun 2025;
2. Sebagai acuan pelaksanaan teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025;
3. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indicator program yang telah ditetapkan Tahun 2025;
4. Sebagai dasar penyusunan KUAPPAS Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja OPD, proses penyusunan Perubahan Renja OPD, keterkaitan antara Perubahan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan



penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II :HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Berjalan dan capaian Renstra BPPRD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja.



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dampak dan capaian, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta formulasi isu penting.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.

Berisikan rancangan awal RKPD berdasarkan hasil analisis kebutuhan PD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait tugas dan fungsi PD.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dikaitkan target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 berdasarkan capaian indikator kinerja Program Kegiatan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja tersebut. Berikut tabel Anggaran dan Capaian Realisasi Program/Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah :

Tabel 2.1
Anggaran dan Capaian Realisasi Program/Kegiatan
Sampai Bulan Juni 2025
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
	I. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.467.760.600	879.916.585	16,13	16,52
1.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.467.760.600	879.916.585	16,13	16,52
	II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.242.840.556	10.121.944.274	38,55	47,67
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.580.500	12.636.000	15,63	15,70



2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.657.873.585	8.968.492.608	39,58	50
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	44.643.000	29,76	30
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.193.121.891	338.690.696	27,80	27,88
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.545.369	0	0,0	0
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.139.504.711	535.806.112	47,19	50
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	947.214.500	221.675.585	23,41	23,60
TOTAL		31.710.601.156	11.001.860.859	34,69	42,32

Secara rinci tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,**
Capaian realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan pada tahun 2025 adalah sebesar 38,55%. Anggaran sebesar Rp. 26.242.840.556,- terealisasi sebesar Rp. 10.121.944.274,- sedangkan realisasi fisik sebesar 47,67%.



- **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah,**

Capaian realisasi keuangan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 adalah sebesar 16,13%. Anggaran sebesar Rp. 5.467.760.600,- terealisasi sebesar Rp. 879.916.585,- sedangkan realisasi fisik sebesar 16,52% dan target pendapatan 12,23% realisasi sebesar 12,32%.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan yaitu pada :

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 254.000.000,- realisasi Rp. 26.775.679,- dengan nilai realisasi keuangan 10,54% dan realisasi fisik sebesar 100%.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil / keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
- Realisasi Kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 43.134.000,- realisasi Rp. 21.879.000,- dengan nilai realisasi 51,93% dan capaian fisik sebesar 100%.



- b. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 13.296.000,- dengan nilai realisasi 23,59% dan capaian fisik sebesar 100%.
- c. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi Rp. 19.750.000,- dengan nilai realisasi 98,8% dan capaian fisik sebesar 100%.

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 417.606.836,- realisasi Rp. 83.548.743,- dengan nilai realisasi 91,84% dan capaian fisik sebesar 100%.
- 2. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 112.780.000,- realisasi Rp. 108.229.244,- dengan nilai realisasi 95,96% dan capaian fisik sebesar 100%.
- 3. Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 459.480.000,- realisasi Rp. 458.573.369,50 dengan nilai realisasi 99,8% dan capaian fisik sebesar 100%.
- 4. Penagihan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 508.588.400,- realisasi Rp. 503.300.323,- dengan nilai realisasi 98,96% dan capaian fisik sebesar 100%.



5. Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 316.412.400,- realisasi Rp. 311.931.966,60 dengan nilai realisasi 98,58% dan capaian fisik sebesar 100%.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja;

Tidak ada program/kegiatan sub kegiatan yang melebihi target kinerja.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor penyebab tidak tercapainya pada sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dikarenakan adanya penundaan Pembayaran pada anggaran belanja 2024 dan mengakibatkan tidak teralisasinya 100% sehingga untuk dimasa yang akan datang diupayakan untuk mengoptimalkan dengan menguatkan komitmen dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus melaksanakan berbagai macam upaya baik melalui program/kegiatan/sub kegiatan baru serta mengajak wajib pajak untuk membayar pajak baik melalui sosialisasi dan media iklan maupun melalui website. Selain itu komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, baik diseluruh UPTB maupun pihak swasta yang mendorong memaksimalkan seluruh daya upaya yang ada untuk mewujudkan target yang ada.



2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Capaian renstra secara umum telah berjalan dengan baik, dengan capaian pada seluruh kegiatan hampir mencapai 100% dan program kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai tidak berdampak pada kinerja secara keseluruhan.

2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja sebagaimana seperti tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9) 11=(10/4)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 02	KEUANGAN								
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%		100		
5 02 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%		100		65,30%
5 02 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Dokumen	3 Laporan, 2 Dokumen
		Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPPRD		3 laporan	2 Laporan			2 Dokumen	3 Laporan, 2 Dokumen
5 02 01 201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	8 laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	14 Laporan
		Outcome : Tersedianya Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yaitu LAKIP, LPPD, LKPD		8 laporan	3 Laporan			3 Laporan	14 Laporan
5 02 01 201 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Output : Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Dikumpulkan dan Dipeniksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	3 laporan	3 Laporan	3 Data	100	3 Data	3 Data
		Outcome : Tersedianya Data Statistik Sektorial Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah		3 laporan	3 Laporan			3 Data	3 Data
5 02 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%		100,00%	100%	100%
5 02 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	113 Orang	113 Orang, 12 Bulan
		Outcome : Tersedianya Gaji dan Tunjangan	113 Orang		12 Bulan			113 Orang	113 Orang, 12 Bulan

5	02	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%
5	02	01	203	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00%
						Outcome : Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0				12 Dokumen		
5	02	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80,42%
5	02	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket				1 Paket	1 Paket	98,10%
						Outcome : 161 Stel Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya							
5	02	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 orang	26 Orang 2 Orang	100	12 Orang	52 Orang	73,25%
						Outcome : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		26 Orang 2 Orang		12 Orang	52 Orang	
5	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	78,01%	100%	100%	80,82%
5	02	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25 jenis	25 jenis	100	1 Paket	1 Paket, 25 Jenis	96,87%
						Outcome : Tersedianya Komponen alat listrik	1 Paket	25 jenis	25 jenis		1 Paket	1 Paket, 25 Jenis	
5	02	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8 jenis	7 Unit 37 Unit	100	6 Paket	6 Paket, 43 Unit	84,10%
						Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket		7 Unit 37 Unit		6 Paket	6 Paket, 43 Unit	
5	02	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	37 jenis	27 jenis	100	2 Paket	2 Paket, 27 Jenis	94,72%
						Outcome : Terperuhnya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2 Paket	37 jenis	27 jenis		2 Paket	2 Paket, 27 Jenis	
5	02	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64 jenis	63 jenis	100	1 Paket	1 Paket, 63 Jenis	79,93%
						Outcome : Lancarnya Administrasi Perkantoran	1 Paket	64 jenis	63 jenis		1 Paket	1 Paket, 63 Jenis	
5	02	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21 jenis	28 jenis	100	1 Paket	1 Paket, 28 Jenis	68,94%
						Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	21 jenis	28 jenis		1 Paket	1 Paket, 28 Jenis	

5	02	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	21.600 Expl	11.600 Eksemplar	10.800 Eksemplar	91,79	12 Dokumen	12 Dokumen, 22.400 Eksemplar	93,88%
						Outcome : Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di BPPRD Kab. Muba	12 Dokumen	21.600 Expl	11.600 Eksemplar	10.800 Eksemplar		12 Dokumen	12 Dokumen, 22.400 Eksemplar	
5	02	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	14 Laporan	14 Laporan, 12 Bulan	26,59%
						Outcome : Lancarnya Konsumsi Rapat dan Konsumsi Tamu	14 Laporan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan		14 Laporan	14 Laporan, 12 Bulan	
5	02	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	12 bulan	25 Kali 20 kali 12 Bulan	12 Bulan	100	55 Laporan	15 Laporan, 12 Bulan	88,25%
						Outcome : Terpenyuhnya Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	55 Laporan	12 bulan	25 Kali 20 kali 12 Bulan	12 Bulan		15 Laporan	15 Laporan, 12 Bulan	
5	02	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Output : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	2 Dokumen	12 bulan	1 Aplikasi 14 Jaringan	12 Bulan	100	2 Dokumen	2 Dokumen, 12 Bulan	35,00%
						Outcome : Tersedianya Jaringan Internet yang baik	2 Dokumen	12 bulan	1 Aplikasi 14 Jaringan	12 Bulan		2 Dokumen	2 Dokumen, 12 Bulan	
5	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100,00%	100%	95,13%	
5	02	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	16 unit	16 Unit	16 Unit	105,00	-	-	94,88%
						Outcome : Mobil 6 Unit, Motor 11 unit			153 Unit	153 Unit				
5	02	01	207	05	Pengadaan Mebel	Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	249 unit	153 Unit	153 Unit	100	17 Unit	419 Unit	87,90%
						Outcome : Tersedianya Meubeler kantor	17 Unit		153 Unit	153 Unit		17 Unit	419 Unit	
5	02	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Paket Pengadaan Gedung yang Disediakan	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	99,70%
						Outcome : Tersedianya Gedung Kantor yang memadai	1 Unit		1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	
5	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	100%			100	100	79,41%	
5	02	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Laporan	12 Laporan, 12 Bulan	69,57%
						Outcome : Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik, Internet dan TV Kabel	12 Laporan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Laporan	12 Laporan, 12 Bulan	
5	02	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	12 bulan	51 Orang	12 bulan	100	10 Laporan	10 Laporan, 12 Bulan	88,31%

[illegible]

5	02	04	201	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Output : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	128 Dokumen	12 Laporan (12 Exp)	12 Laporan	12 Laporan	100	128 Dokumen	128 Dokumen	98,58%
						Outcome : Tersedianya laporan realisasi pendapatan daerah yang akuntabel dan transparan	128 Dokumen					128 Dokumen	128 Dokumen	
5	02	04	201	11	Penagihan Pajak Daerah	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	5,000 lembar (SPRPO, SSPD, SKPDKSB, STPD)	12462500000 Rupiah 14500000000 Rupiah 47825404000 Rupiah	12462500000 Rupiah 14500000000 Rupiah 47825404000 Rupiah	100	11 Dokumen	11 Dokumen	98,96%
						Outcome : Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi dan Permohonan Keberatan Yang terselesaikan Rp. 32 Miliar dan 6000 WP dan Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi	11 Dokumen					11 Dokumen	11 Dokumen	
5	02	04	201	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Output : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	182 Dokumen	100.000 WP	4 Laporan 1 Dokumen 25000000000 Rupiah 11 Pajak Daerah 1 Laporan 15 Retribusi 3 Sektor 30 Wajib Pajak 40 wajib Pajak	4 Laporan 1 Dokumen 25000000000 Rupiah 11 Pajak Daerah 1 Laporan 15 Retribusi 3 Sektor 30 Wajib Pajak 40 wajib Pajak	100	182 Dokumen	182 Dokumen	77,03%
						Outcome : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	182 Dokumen							
5	02	04	201	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000 WP	4 Laporan 1 Dokumen 25000000000 Rupiah 11 Pajak Daerah 1 Laporan 15 Retribusi 3 Sektor 30 Wajib Pajak 40 wajib Pajak	4 Laporan 1 Dokumen 25000000000 Rupiah 11 Pajak Daerah 1 Laporan 15 Retribusi 3 Sektor 30 Wajib Pajak 40 wajib Pajak	100	1 Dokumen	1 Dokumen	81,99%

5	02	04	201	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Outcome : Laporan Evaluasi Pendapatan yang akurat dan akurat Terbitnya Surat Keputusan Penghapusan dan Laporan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB Tercapainya target penerbitan Pajak Daerah Terlaksananya Pengawasan Pajak Daerah yang sesuai dengan aturan dan prosedur Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkala Terlaksananya Retribusi Daerah dan Benda berharga yang sesuai dengan aturan dan prosedur Tersedianya Data Objek / Subjek dan Realisasi DBH PBB Sektor P3 Tersedianya Wajib Pajak Perorangan Tersedianya Wajib Pajak Perorangan Output : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	100.000 WP	4 Laporan 1 Dokumen 25000000000 Rupiah 11 Pajak Daerah 1 Laporan 15 Retribusi 3 Sektor 30 Wajib Pajak 40 wajib Pajak	4 Laporan 1 Dokumen 25000000000 Rupiah 11 Pajak Daerah 1 Laporan 15 Retribusi 3 Sektor 30 Wajib Pajak 40 wajib Pajak	-	2 Laporan	2 Laporan	58,56%
5	02	04	201	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Outcome : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Output : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	100.000 WP	4 Laporan 1 Dokumen 25000000000 Rupiah 11 Pajak Daerah 1 Laporan 15 Retribusi 3 Sektor 30 Wajib Pajak 40 wajib Pajak	4 Laporan 1 Dokumen 25000000000 Rupiah 11 Pajak Daerah 1 Laporan 15 Retribusi 3 Sektor 30 Wajib Pajak 40 wajib Pajak	-	2 Laporan	2 Laporan	90,31%



2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator Kinerja	Target SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025 (s/d Juni)	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah		Persen	12,23	12,53	12,85	13,17	13,51	10,57	12,32	12,23	12,53	
				%	%	%	%	%	%	%	%	%	

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja Persentase PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2024 adalah sebesar 10,57%. Capaian kinerja ini belum melebihi target renstra BPPRD untuk tahun 2024. Target kinerja ini direncanakan didalam renstra BPPRD meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2029. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Khususnya di sektor pajak daerah dan retribusi daerah.



Indikator peningkatan PAD didukung oleh kegiatan Pendataan dengan Validasi/ Verifikasi Data PBB, Pendaftaran/Pendataan, Pemutahiran Data dan Konfirmasi Data Pajak Daerah, Penyampaian SPPT PBB, Penagihan/ Pemungutan PAD Kab. Muba, Intensifikasi PBB, Intensifikasi Pendapatan Daerah dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil, Penetapan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kab. Muba, Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pajak Daerah, Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pembuatan Papan Himbauan Pajak Daerah, Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan (P2), Pelayanan dan Publikasi Pajak Daerah, Implementasi Aplikasi Simda Pendapatan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat pelayanan sudah baik tetapi masih perlu dioptimalkan diantaranya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta masih perlu ditunjang dengan sarana prasarana pendukung lainnya. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak daerah. Tantangan yang dihadapi dengan rentang wilayah geografis yang luas mengakibatkan proses pengawasan terhadap wajib pajak dalam proses pembayaran belum optimal, sehingga peluang dengan luasan wilayah tersebut akan mengoptimalkan peranan UPT BPPRD yang berada di 14



Kecamatan dalam proses pelayanan pajak daerah dan PBB.

Dengan penjelasan diatas maka yang menjadi isu-isu penting pada Tahun 2025 antara lain :

- Meningkatkan kualitas kompetensi SDM, meningkatkan sarana dan prasarana perlengkapan kantor serta pengembangan pemanfaatan inovasi berbasis teknologi informasi,
- Melanjutkan kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan pelayanan penerimaan pajak daerah, kerjasama dalam hal pengawasan dan pengendalian pajak daerah dengan pihak lain.
- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mengantisipasi kejadian serupa dan solusi penanganannya. Seluruh stakeholder harus mengambil peran masing-masing dalam memecahkan masalah tersebut.
- Meningkatkan sosialisasi keseluruhan wajib pajak tentang taat pajak daerah guna mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kedepannya akan di tingkatkan memberikan penghargaan dan hadiah kepada wajib pajak yang taat melakukan pembayaran pajak.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir P-RKPD

Rancangan Akhir Perubahan Renja BPPRD Tahun 2025 sudah berdasarkan hasil analisis kebutuhan Tahun 2025, yang berisikan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan total usulan pada ranhir renja sebesar



Rp.38.921.878.496,00.Review rancangan akhir RKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disajikan dalam tabel 2.4 dibawah ini :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	200.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	218.234.200,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	267.078.800,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	420.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	363.403.891,00
Penyediaan Bahan Material	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Bahan Material	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00
Facilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000,00	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.188.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189.217.000,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.545.369,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	-
Pengadaan Mebel	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	66.545.369,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.232.860.267	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.470.704.711,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	398.516.267,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	398.516.267,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	834.344.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.072.188.444,00

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				902.385.500	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				947.214.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	186.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	182.560.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	327.970.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	327.970.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	338.436.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	386.705.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	49.979.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	49.979.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				5.795.600.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				4.555.903.900,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				5.795.600.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				4.555.903.900,00
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	478.100.000,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	183.078.000,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	324.800.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	267.122.500,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	427.666.200,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	103.800.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit	102.117.800,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit	79.600.800,00

Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah	3 Laporan	860.000.000,00	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah	3 Laporan	600.584.000,00
Pengolahan, dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah	2 Laporan	250.000.000,00	Pengolahan, dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah	2 Laporan	445.429.600,00
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NIOP nya	200 Obyek Pajak	264.000.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NIOP nya	253000 Obyek Pajak	280.284.500,00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	875.500.000,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	818.478.500,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	480.000.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	407.015.000,00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	128 Dokumen	550.000.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	128 Dokumen	362.410.000,00
Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	371.216.000,00	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	261.136.000,00
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	182 Dokumen	220.000.000,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	182 Dokumen	269.497.000,00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	142 Dokumen	392.200.000,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	142 Dokumen	361.103.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	100.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	25.040.000,00

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	100.000.000,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	91.325.000,00	
BELANJA PD					32.393.021,252	BELANJA PD				



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari hasil kajian pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa hingga Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten dan dari pemangku kepentingan tahun 2025 tidak terdapat usulan program/ kegiatan, seperti Tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan BPPRD adalah Penerimaan Negara yang Optimal Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.

Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan penerimaan negara yang optimal adalah:

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya.
- b. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
- c. Pengembangan layanan pajak, serta PNBP berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly.
- d. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, serta pemetaan potensi PNBP.
- e. Modernisasi sistem administrasi pajak, serta PNBP.



- f. Penguatan kerja sama dengan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan pajak daerah.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas, mulai tahun 2021-2024 Kementerian Keuangan memiliki lima program yang terdiri dari:

1. Program Kebijakan Fiskal;
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara;
3. Program Pengelolaan Belanja Negara;
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; dan
5. Program Dukungan Manajemen.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tercantum dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029. Adapun Tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai Indikator Tujuan/Sasaran yang akan dicapai yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.



Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TargetTujuan /Sasaran
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,23%
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Program Penunjang Bidang Urusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	100 %
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dilaksanakan dengan Baik	100 %
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan tepat waktu	100 %
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik	100 %



3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun anggaran 2025 merencanakan 2 (Dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.38.921.878.496,00.dapat dilihat dalam tabel 3.2.berikut ini:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Nama Perangkat Daerah : **BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Perubahan RKPD Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.02	KEUANGAN									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH									
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin	2 Dokumen	44.161.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	120.000.000,00	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin	3 Laporan	10.684.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	120.000.000,00	
5.02.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin	3 Data	33.735.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Data	40.000.000,00	
5.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin	113 Orang	30.449.807.625,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		113 Orang	24.000.000.000,00	
5.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH									
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	210.000.000,00	

5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Musi Banyuasin	28 Orang	150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28 Orang	410.000.000,00
5.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			100 %	1.193.121.891,00			100 %	4.100.000.000,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	30.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	195.000.000,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	218.234.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	890.000.000,00
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	60.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	190.000.000,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	267.078.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	1.010.000.000,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin	2 Paket	363.403.891,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	1.010.000.000,00
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab. Musi Banyuasin	1 Paket	40.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	75.000.000,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin	12 Laporan	25.188.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	80.000.000,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin	12 Laporan	189.217.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	650.000.000,00
5.02.01.2.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100%	66.545.369,00			100%	210.000.000,00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin	25 Unit	66.545.369,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29 Unit	210.000.000,00
5.02.01.2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.470.704.711,00				2.450.000.000,00

5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin	4 Laporan	398.516.267,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	1.200.000.000,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin	12 Laporan	1.072.188.444,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	1.250.000.000,00
5.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100%	947.214.500,00			100%	2.360.000.000,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Musi Banyuasin	1 Unit	182.560.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	360.000.000,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Musi Banyuasin	10 Unit	327.970.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 Unit	400.000.000,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Banyuasin	5 Unit	386.705.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	1.500.000.000,00
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Banyuasin	65 Unit	49.979.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65 Unit	100.000.000,00

5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				100%	4.555.903.900,00				100%		5.740.000.000,00
5.02.04.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				100%	4.555.903.900,00				100%		5.740.000.000,00
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin	1 Dokumen		183.078.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2 Dokumen		500.000.000,00
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin	8 Dokumen		267.122.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7 Dokumen		320.000.000,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin	2 Laporan		103.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2 Laporan		450.000.000,00
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin	22 Unit		79.600.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7 Unit		130.000.000,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin	3 Laporan		600.584.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3 Laporan		500.000.000,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin	4 Laporan		445.429.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2 Laporan		300.000.000,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Musi Banyuasin	270000 Obyek Pajak		280.284.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			270000 Obyek Pajak		280.000.000,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin	3 Dokumen		818.478.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3 Dokumen		500.000.000,00

5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin	11 Layanan	407.015.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Layanan	500.000.000,00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Musi Banyuasin	90 Dokumen	362.410.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		128 Dokumen	580.000.000,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin	250 Dokumen	261.136.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	400.000.000,00
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin	20 Dokumen	269.497.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	250.000.000,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin	2 Dokumen	361.103.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	560.000.000,00
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Musi Banyuasin	4 Laporan	25.040.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Laporan	360.000.000,00
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin	3 Laporan	91.325.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Laporan	110.000.000,00



BAB IV

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk menunjang kebutuhan operasional kantor dan menciptakan aparatur yang berkualitas serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah maka diperlukan dukungan dari beberapa program.

Tujuan dan sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung oleh beberapa Program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut:

TUJUAN : Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang pelaksanaan Bidang Urusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

SASARAN : Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah



A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target/Keluaran Kegiatan Sub : 2 Dokumen

Hasil Kegiatan : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KebutuhanDana : Rp.44.161.500,-

SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil

Target/Keluaran Kegiatan Sub : 3 Laporan

Hasil Kegiatan : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KebutuhanDana : Rp.10.684.000,-

SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
- Target/Keluaran Sub : 3 Data
- Hasil Kegiatan : Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- KebutuhanDana : Rp.33.735.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Keluaran SubKegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- Target/Keluaran SubKegiatan : 113Orang/Bulan
- Hasil Kegiatan : Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- KebutuhanDana : Rp.30.449.807.625,-
- SumberDana : Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
- Target/KeluaranSubKegiatan : 1Paket
- HasilKegiatan : Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- KebutuhanDana : Rp. 0,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



2. SubKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Keluaran SubKegiatan : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- Target/KeluaranSubKegiatan : 12 Orang
- HasilKegiatan : Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- KebutuhanDana : Rp.150.000.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. SubKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Target/Keluaran Sub Kegiatan : 1 Paket
- Hasil Kegiatan : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kebutuhan Dana : Rp.30.000.000,-
- Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Keluaran SubKegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Target/Keluaran SubKegiatan : 1 Paket
- Hasil Kegiatan : Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat Daerah
- KebutuhanDana : Rp.218.234.200,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



3. SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Keluaran SubKegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
- Target/Keluaran SubKegiatan : 1 Paket
- HasilKegiatan : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- KebutuhanDana : Rp.60.000.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. SubKegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
- Target/KeluaranSubKegiatan : 1 Paket
- HasilKegiatan : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- KebutuhanDana : Rp.267.078.800,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
- Target/KeluaranSubKegiatan : 1 Paket
- HasilKegiatan : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- KebutuhanDana : Rp. 363.403.891,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



6. SubKegiatan Penyediaan Bahan Material
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Material
- Target/KeluaranSubKegiatan : 1 Paket
- HasilKegiatan : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- KebutuhanDana : Rp.40.000.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. SubKegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Target/KeluaranSubKegiatan : 12 Laporan
- HasilKegiatan : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- KebutuhanDana : Rp.25.188.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
- Target/KeluaranSubKegiatan : 12Laporan
- HasilKegiatan : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- KebutuhanDana : Rp.189.217.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**G. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah****1. SubKegiatan Pengadaan Mebel**

Keluaran SubKegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang disediakan
Target/KeluaranSubKegiatan	: 25 Unit
HasilKegiatan	: Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
KebutuhanDana	: Rp.66.545.369,-
SumberDana	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Keluaran SubKegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target/KeluaranSubKegiatan	: 4 Laporan
HasilKegiatan	: Terpenuhinya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
KebutuhanDana	: Rp.398.516.267,-
SumberDana	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. SubPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KeluaranSubKegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target/KeluaranSubKegiatan	: 12 Laporan
HasilKegiatan	: Terpenuhinya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
KebutuhanDana	: Rp.1.072.188.444,-
SumberDana	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**I. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah**

1. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Keluaran SubKegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya

Target/KeluaranSubKegiatan : 1 Unit

HasilKegiatan : Terlaksananya Pemerintahan Barang Milik Daerah

KebutuhanDana : Rp.182.560.000,-

SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan

KeluaranSubKegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya

Target/KeluaranSubKegiatan : 1 Unit

HasilKegiatan : Terlaksananya Pemerintahan Barang Milik Daerah

KebutuhanDana : Rp.327.970.000,-

SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



3. SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
- Target/KeluaranSubKegiatan : 3 Unit
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik
- KebutuhanDana : Rp.386.705.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah SaranadanPrasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
- Target/KeluaranSubKegiatan : 52Unit
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- KebutuhanDana : Rp.49.979.500,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah merupakan program untuk menunjang dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah, yang kegiatan dan subkegiatannya meliputi :

TUJUAN : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

SASARAN : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

1. SubKegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Keluaran SubKegiatan : Jumlah Dokumen Rencana
Pengelolaan Pajak Daerah
Target/KeluaranSubKegiatan : 1 Dokumen
HasilKegiatan : Terlaksananya Peningkatan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
KebutuhanDana : Rp.183.078.000,-
SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. SubKegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
Keluaran SubKegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak
Daerah serta Pengembangan Pajak
Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Target/KeluaranSubKegiatan : 8 Dokumen
HasilKegiatan : Terlaksananya Peningkatan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
KebutuhanDana : Rp.267.122.500,-
SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



3. SubKegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Keluaran SubKegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Target/KeluaranSubKegiatan : 2 Laporan
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- KebutuhanDana : Rp.103.800.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. SubKegiatan *Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*
- Keluaran SubKegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Target/KeluaranSubKegiatan : 22 Unit
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- KebutuhanDana : Rp. 79.600.800,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. SubKegiatan *Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
- Target/KeluaranSubKegiatan : 3 Laporan
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- KebutuhanDana : Rp.600.584.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



6. SubKegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Keluaran SubKegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Target/KeluaranSubKegiatan : 4 Laporan
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- KebutuhanDana : Rp.445.429.600,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. SubKegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Keluaran SubKegiatan : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya
- Target/KeluaranSubKegiatan : 270.000 ObjekPajak
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- KebutuhanDana : Rp.280.284.500,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. SubKegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
- Target/KeluaranSubKegiatan : 3 Dokumen
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- KebutuhanDana : Rp.818.478.500,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



9. SubKegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Target/KeluaranSubKegiatan : 11Layanan
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- KebutuhanDana : Rp.407.015.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10. SubKegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Keluaran SubKegiatan : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
- Target/Keluaran SubKegiatan : 90 Dokumen
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- KebutuhanDana : Rp.362.410.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11. SubKegiatan Penagihan Pajak Daerah
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
- Target/KeluaranSubKegiatan : 3 Dokumen
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- KebutuhanDana : Rp.261.136.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



12. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- KeluaranSubKegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Target/KeluaranSubKegiatan : 20 Dokumen
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- KebutuhanDana : Rp.269.497.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
13. SubKegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Keluaran SubKegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
- Target/KeluaranSubKegiatan : 2 Dokumen
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- KebutuhanDana : Rp.361.103.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
14. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Keluaran SubKegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi
- Target/KeluaranSubKegiatan : 4 Laporan
- HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- KebutuhanDana : Rp.25.040.000,-
- SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



15. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Keluaran SubKegiatan : Jumlah Laporan Perkembangan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah

Target/Keluaran
SubKegiatan : 3 Laporan

HasilKegiatan : Terlaksananya Pengelolaan
Pendapatan Daerah

KebutuhanDana : Rp.91.325.000,-

SumberDana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)



BABV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 – 2029 dan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2025-2029. Rencana Kerja ini dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan dan sebagai alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam pencapaian program dan kegiatan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian dan kerjasama antar bidang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur perencanaan sekaligus pelaksanaan dari kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Terlaksananya penyusunan Perubahan Renja BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 akan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya.



Kaidah Pelaksanaan

- 1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai struktur organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dan kegiatan yang ada didalam Renstra BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
- 2) Kepala Badan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan organisasi BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan Renstra BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan aparatur yang ada;
- 3) Sekretaris,berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kerja yang ada dalam Renstra BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 –2029;
- 4) Setiap unit kerja di lingkungan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini Kepala Bidang dan Sekretaris berkewajiban menyusun Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025– 2029;
- 5) Untuk merealisasikan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dan Renstra BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu :



- a) Prinsip perencanaan kegiatan, mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas (*smart planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentative dan memiliki kekhususan (*specific*), terukur (*measureable*), ketercapaian (*achievable*), ketersediaan sumber daya (*resourcesavailability*), dan waktu (*time*);
- b) Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *shewhartcycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan rencanakan (*plan*), kerjakan apa yang telah direncanakan (*do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*check*) dan aksi tindaklanjut (*action*);
- c) Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas yang memiliki 3 (tiga) aspek yaitu:
 - Taat dan sesuai aturan;
 - Sesuai dengan norma professional;
 - Berorientasi pada hasil yang berkualitas.
- d) Prinsip dukungan kebijakan keuangan yang mengikuti kebutuhan program terpilih;
- e) Prinsip pengendalian, untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan :
 - Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan, ketaatan waktu dan output;
 - Desk akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.



- f) Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antar pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota;
- g) Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan RKT yang dilakukan setiap akhir tahun terhadap indikator kinerja visi, misi dan program untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam rangka clean governance dan good governance;
- h) Evaluasi kinerja tersebut sebagai pedoman dan penyusunan LKjIP BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, LKPJ kepada Bupati Musi Banyuasin dan LPPD BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Laporan-laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin kepada Bupati atas pelaksanaan penyelenggaraan keberadaan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin;



- i) LKjIP BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya akan diperiksa, dievaluasi dan dinilai bersama-sama oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sumatera Selatan dan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;

Demikian Perubahan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dibuat dan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

Sekayu, 16 Juni 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

HARYADI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690804199203 1007